
**PERILAKU PEMILIH PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF 2019
DI GAMPONG TAMPANG KECAMATAN SAMADUA
KABUPATEN ACEH SELATAN**

Asyatul Arza¹, Yeni Sri Lestari², Devi Intan Chadijah³, Lilis Sariyanti⁴

¹Mahasiswa Prodi Sosiologi Universitas Teuku Umar

^{2,3,4}Dosen Prodi Sosiologi Universitas Teuku Umar

yenisrilestari@utu.ac.id², intanchadijah@utu.ac.id³, lilissariyanti@utu.ac.id⁴

Abstract

This research was conducted to find out how voters behaved in the 2019 legislative elections in Gampong Tampang. The aim of this research is to determine the factors that influence the political behavior of the people of Tampang Gampong in determining their choices in the 2019 legislative elections. This research uses a qualitative descriptive method with a purposive sampling technique for determining informants and a purposive sampling technique for determining informants and data collection techniques in the form of interview and documentation. The research results show that voting behavior is influenced by three factors. First, social factors consisting of indicators of age, education, employment and economic status and religion. Second, psychological factors, which consist of 2 indicators, namely political and emotional identities built by legislative candidates and their teams. Third, economic factors. The indicators that are influenced by economic factors are related to welfare. If voters from the lower class will choose candidates who offer programs related to opening up job opportunities, voters from upper class economic status will focus more on candidates who guarantee political stability which is closely related to decision making that will have an impact on the voter's own income.

Keywords: *Behavior, Voters, Legislative General Election*

1. PENDAHULUAN

Pelaksanaan pemilihan umum dilakukan secara merata pada tiap-tiap daerah tanpa pengecualian termasuk Aceh, salah satunya di Gampong Tampang. Pemilihan umum legislatif 2019 yang terjadi di Gampong Tampang belum memenuhi kriteria pemilu yang baik, karena masih terdapat kelompok masyarakat yang bersifat acuh dan apatis terkait penyelenggaraan pemilu legislatif yang dilaksanakan pada 4 April 2019. Ada banyak alasan mengapa sikap apatis tersebut ibarat menjadi kebudayaan pada masyarakat Gampong Tampang. Pada dasarnya setiap kelompok masyarakat tidak peduli dengan perubahan maupun *reshuffle* para pemimpin karena masyarakat menganggap tidak ada perubahan yang signifikan meskipun pemimpin berubah (Gleko,

et al., 2017). Janji palsu yang kerap diumbar pada masa kampanye hanya menjadi sebuah kiasan yang tidak pernah terlihat wujud nyata, fenomena tersebut semakin menambah sikap apatis masyarakat terhadap pelaksanaan pemilihan umum.

Fenomena di atas telah membentuk sikap apatis pada kelompok masyarakat. Masyarakat hanya dijadikan sarana untuk mengumpulkan dukungan suara pada calon elit politik (Fahmi & Jamaldi, 2015). Setelah pemilihan umum legislatif maupun pemilihan umum lainnya selesai, maka masyarakat pendukung serta visi misi berakhir dan akan terlupakan. Kejadian berulang ini membekas dalam ingatan masyarakat yang akhirnya menjadikan masyarakat enggan mengikuti proses politik secara maksimal.

Pada saat pemilihan umum legislatif 2019, persaingan yang terjadi tidak hanya calon legislatif saja. Namun masyarakat juga ikut bersaing, bahkan perilaku yang ditunjukkan oleh masyarakat pada saat Pileg tersebut menimbulkan konflik antara individu yang satu dengan yang lainnya (Pahmi, et al., 2021). Bentuk konflik yang terjadi antara lain hilangnya komunikasi antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Bahkan, konflik juga terjadi dalam sebuah keluarga, hanya karena berbeda pilihan calon legislatif yang didukung. Masyarakat yang biasanya akrab berubah menjadi bermusuhan. Ada yang disebabkan karena berbeda pilihan dan ada pula yang bermusuhan karena tidak menepati janji (Gleko, et al., 2017). Masyarakat Gampong Tampang khususnya para pemudanya yang dianggap kompak atau solid oleh gampong lainnya bahkan terpecah belah saat berlangsungnya Pileg 2019 lalu.

Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka masyarakat tidak akan pernah mendapatkan perwakilan rakyat yang baik dan jujur dalam menjalankan tugas di masa jabatannya (Pahmi, et al., 2021). Ironinya, setiap calon legislatif (caleg) yang menang telah menghabiskan banyak uang untuk mendapatkan kursinya. Sehingga diasumsikan bahwa mereka berupaya mengembalikan uang yang telah mereka habiskan yang berujung adanya tindakan korupsi. Program yang mereka janjikan saat kampanye tidak dijalankan dengan semestinya. Disisi lain, ada pemimpin yang jujur dan adil, namun mereka tidak terpilih dikarenakan tidak mampu memberi “serangan fajar” pada masyarakat.

Perilaku masyarakat selama masa pileg juga menimbulkan permasalahan dalam masyarakat menjelang pemilu, perilaku seperti yang terdapat di Gampong Tampang Kabupaten Aceh Selatan, di mana antar pemilih saling sindir, hina, bahkan *hate speech*. Hal ini menyebabkan terjadinya konflik dalam masyarakat. Namun, konflik ini akan hilang seiring selesainya kontestasi pemilihan umum. Dengan berakhirnya pileg maka masyarakat kembali seperti semula. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk melihat bagaimana perilaku pemilih pada pemilihan umum legislatif 2019.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Perilaku merupakan suatu respon yang didapatkan dari suatu stimulus tertentu (Wirawan, 2015). Sedangkan definisi pemilih adalah individu yang berpartisipasi untuk memberikan suara dalam ajang pemilihan umum. Pemilih merupakan unsur utama yang sangat dibutuhkan oleh para kontestan Pemilu untuk dipengaruhi agar memberikan dukungan kepada mereka. Adapun calon pemilih berasal dari konstituen yaitu sekelompok masyarakat yang memiliki sebuah ideologi yang tergabung dalam partai politik serta masyarakat pada umumnya (Mustanir & Jaya, 2016).

Dalam hal ini, dapat dilihat bahwa definisi dari perilaku pemilih ialah serangkaian respon individu dalam menentukan pilihan yang sesuai dengan keinginan pemilih (Sentosa & Karya, 2022). Pada dasarnya, perilaku pemilih dalam kontestasi Pemilu memiliki pengaruh yang signifikan terkait sukses atau tidaknya pelaksanaan Pemilu tersebut. Pengaruh ketokohan juga berdampak besar kepada pemilih. Sikap tersebut tercermin pada dominasi ketokohan yang berperan untuk menentukan sikap dan perilaku serta orientasi warga tergantung pada pemuka masyarakat tersebut (Rachmat & Esther, 2016).

Perilaku politik dapat diartikan sebagai sebuah respon manusia dalam menghadapi situasi politik. Relasi antara masyarakat dan pemerintah, maupun kelompok lain yang lain yang ada dalam masyarakat dalam rangka menjalani proses jalannya proses Pemilu juga dapat disebut sebagai perilaku politik. Perilaku politik juga sangat ditentukan oleh budaya masyarakat setempat. Semua yang berhubungan dengan pernyataan, tindakan, ucapan, bahkan *hoax* sekalipun dapat dikatakan sebagai pola dan budaya dalam berpolitik. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa perilaku aktor politik adalah sebuah ukuran dalam menentukan karakter individu dalam membangun relasi (Prasetya & Adi, 2014).

Terkait perilaku pemilih dapat dilihat dalam tiga pendekatan, yakni:

1. Pendekatan Sosiologis. Dalam menentukan pilihan, biasanya masyarakat dipengaruhi oleh faktor ekonomi serta status sosialnya. Dengan demikian, adanya keterkaitan antara pilihan pemilih dengan lingkungan sekitarnya. Hal ini juga dapat mengidentifikasi kelas sosial seperti adanya kesamaan antara kedudukan sosial individu dengan kedudukan sosial partai politik yang akan dipilih (Sitepu, 2012).
2. Pendekatan Psikologis. Dalam melihat perilaku pemilih, juga bisa menggunakan pendekatan psikologis, yakni dengan melihat konsep sosialisasi dan sikap. Konsep ini dapat menentukan perilaku politik setiap individu. Maka oleh sebab itu menurut pendekatan psikologis, konsep sosialisasi yang menjadikan setiap individu memiliki pilihan yang berbeda. Pendekatan ini menitikberatkan kepada tiga indikator yakni ikatan emosional yang dibangun dalam sebuah partai, kepekaan terhadap isu-isu yang ada, serta orientasi terhadap kandidat (Surbakti, 1999).
3. Pendekatan Rasional. Pendekatan ini menitikberatkan pada untung dan rugi saat individu memilih partai politiknya. Hal ini juga menjadi faktor mudahnya individu

berpindah keberpihakannya dari sebuah partai ke partai yang lain. Pendekatan ini erat kaitannya dengan ekonomi, yang mana melihat keputusan dalam memilih sebagai sebuah produk hasil perhitungan untung rugi seseorang maupun kelompok. Dengan demikian, yang akan jadi bahan pertimbangan dalam pendekatan ini bukan hanya “ongkos” saat memilih, namun dukungan pemilih harus mampu memenangkan kontestasi tersebut (Rahman, 2018).

Teori perilaku politik yang dikaji dengan pendekatan sosiologis mengartikan bahwa faktor sosial seperti strata sosial, keadaan ekonomi, agama, warna kulit dan pekerjaan dapat mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihannya (Rachmat & Esther, 2016). Teori tersebut juga digunakan di negara-negara eropa untuk menganalisis pemilu. Dengan pendekatan sosiologis perilaku para pemilih juga dapat dihubungkan dengan stratifikasi sosial serta status dan peran para pemilih. Adapun kelas yang dimaksud dalam hal ini ialah kelompok partai politik yang sudah berkembang dalam kelompok masyarakat yang homogen karena aspek sosial ekonomi tertentu. Faktor hubungan sosial ekonomi dengan kelompok sosial masyarakat serta status sosial berdasarkan umur, agama dan jenis kelamin. Secara sosiologis, kelompok sosial merupakan wadah individu dalam keluarga, pekerjaan, kelompok keagamaan, maupun relasi dengan kelompok sosial lain. Kelompok sosial mempunyai peranan penting untuk membentuk perilaku pemilih dalam pemilihan umum (Miaz, 2012).

Sosiologis menempatkan pemilih cenderung kepada status sosial pada konteks sehari-hari. Secara sosiologis, mereka memilih berdasarkan kesamaan karakteristik seperti agama, kelas sosial, kesamaan wilayah dan sebagainya (Mopeng, 2016). Masyarakat menentukan pilihannya juga didasari hubungan kekerabatan. Banyak masyarakat menentukan pilihannya bukan didasari perilaku yang baik berdasarkan standar ketentuan yang ada. Masyarakat menentukan pilihannya bukan melihat bobot atau kualitas calon tetapi masyarakat menentukan pilihannya karena didasari oleh adanya *take and give* (Wirawan, 2015). Jika hal seperti ini terus terjadi maka masyarakat tidak akan mendapat seorang wakil yang baik dan jujur.

Menurut Mopeng, perilaku pemilih dapat dipengaruhi oleh tiga faktor yakni faktor pendidikan, status pekerjaan, serta umur dan jenis kelamin (Mopeng, 2016). Hal ini dapat digambarkan bahwa semakin tinggi pendidikan seseorang, maka perilaku berpolitik semakin berbeda dengan orang yang tidak memiliki status pendidikan tinggi. Fenomena ini juga sejalan dengan semakin tinggi status sosial individu, maka semakin berbeda dengan orang yang memiliki status sosial yang rendah. Sama halnya dengan orang yang tidak memiliki jabatan, dengan kata lain memiliki pendapatan yang rendah, maka semakin mudah untuk mempengaruhi keputusannya dalam memilih. Secara usia pun sama, semakin lanjut usia individu maka perilaku dalam memilih juga akan berbeda dengan usia yang lebih muda. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa ketiga indikator tersebut dapat mempengaruhi perilaku pemilih dalam menentukan pilihannya.

3. METODE PENELITIAN

Dalam riset ini, metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa dan kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian kualitatif deskriptif fokus terhadap masalah yang kompleks sebagaimana fakta di lapangan. Dengan penelitian tersebut, peneliti akan menjadi pendengar atau penonton yang baik terhadap peristiwa yang terjadi. Penelitian kualitatif ialah proses menyajikan kehidupan sosial dan perspektif terhadap permasalahan sosial, baik itu dari persepsi, perilaku, konsep, dan permasalahan terkait kelompok yang dikaji (Moleong, 2011). Adapun teknik dalam menentukan informan dalam penelitian ini ialah menggunakan *purposive sampling* yaitu dengan mementingkan tujuan penelitian dengan membuat kriteria tertentu (Bungin, 2012). Terdapat dua kriteria dalam penelitian ini yakni usia dan pendidikan. Pada kategori usia, peneliti hanya meneliti pada usia 25 tahun hingga 60 tahun saja. Hal ini dikarenakan berdasarkan hasil observasi awal peneliti di Gampong Tampang, pada usia ini masyarakat dinilai lebih terbuka terhadap kondisi politik. Pada kategori pendidikan terakhir yakni SMP, SMA, S1 dan S2, sehingga dapat memberikan pandangan yang bervariasi terkait alasan dan motif saat menentukan pilihan.

4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, peneliti menemukan informasi terkait beberapa hal yang mempengaruhi perilaku pemilih dalam menentukan pilihannya. Salah satunya adalah usia dan pekerjaan. Hal ini diutarakan oleh informan berikut:

“Umur maupun pekerjaan caleg juga jadi perhatian. Jangan kita pilih calon yang dulunya preman. Bisa-bisa kita diperas nantinya gitu juga dengan umur. Jangan kita pilih yang terlalu tua. Karena yang tua udah pasti sering sakit. Gitu juga jangan terlalu muda, nanti gak mampu waktu memimpin” (Ali, 2020).

Dari informasi tersebut, dapat dilihat bahwa pemilih saat menentukan pilihannya terdapat beberapa pertimbangan, seperti usia dan pekerjaan. Secara rasional, pemilih akan memilih calon legislatif yang tidak terlalu muda maupun terlalu tua. Hal ini dikarenakan caleg yang terlalu tua dianggap memiliki kondisi kesehatan yang kurang prima sehingga dikhawatirkan akan kurang maksimal dalam memimpin. Begitu juga jika caleg yang terlalu muda, masyarakat khawatir jika caleg tersebut tidak mampu mengemban amanah dikarenakan kurangnya pengalaman. Namun berbeda dengan pandangan dari Saudara Said Sar selaku pemilih:

“Umur dan pekerjaan caleg bukan sebuah ukuran untuk menilai mampu tidaknya dia pas memimpin. Karena setiap calon sudah memiliki strategi masing-masing untuk ke depan. Artinya calon yang naik ini pasti sudah menyiapkan program kerjanya. Jadi kita gak boleh anggap sepele orang yang

lebih muda atau orang yang pekerjaannya rendah. Bisa jadi dia orang yang paling baik dalam memimpin” (Sar, 2020).

Pernyataan dari informan di atas ditemukan bahwa adanya rasionalitas atas kualitas program kerja yang dibangun oleh pemilih terhadap calon legislatif yang dipilih. Dengan demikian adanya keberagaman atas pandangan dari pemilih yang dipengaruhi oleh lingkungan dimana pemilih itu berada. Disisi lain, ditemukan informasi yang berbeda dari kedua informan di atas. Informasi ini menjadi temuan yang unik yakni sebagai berikut:

“Seharusnya kita juga melihat latar belakang calon. Kalau latar belakangnya baik, pasti kebijakan yang diambil juga baik. Ibarat seperti menanam pohon. kalau mau buahnya banyak, bagus, maka kita harus memilih bibit yang unggul. Orang yang paham agama akan berbeda waktu mengambil keputusan dengan orang yang jauh akan agama” (Ami, 2020).

Berdasarkan pernyataan tersebut, ditemukan bahwa masih adanya pengaruh terkait latar belakang dalam menentukan pilihan. Baik latar belakang secara keluarga, pendidikan, maupun latar belakang agama. Sebagian pemilih masih berpatokan pada bibit, bebet, dan bobot. Calon yang memiliki bibit yang baik, maka akan lebih berbobot menjadi pemimpin.

Tak hanya latar belakang para caleg, visi dan misi yang disampaikan juga memiliki pengaruh yang signifikan bagi pemilih. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Emi Gustia: “ya, dengan adanya visi dan misi calon, kita akan tau apa yang akan dilakukan ke depannya” (Gustia, 2020). Namun berbeda dengan yang diungkapkan oleh beberapa pemilih mengenai visi dan misi caleg. Salah satunya seperti yang diutarakan oleh Linda Wati: “saya tidak melihat visi dan misi, karena pengalaman selama ini banyak janji yang dikampanyekan tidak terealisasi. Jadi visi dan misi tidak menjadi poin penilaian utama bagi saya” (Wati, 2020).

Berdasarkan temuan di lapangan, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor yang memengaruhi perilaku pemilih pada masyarakat Gampong Tampang yaitu:

1. Faktor Sosial. Dalam penelitian ini terdapat 4 indikator yang dapat dijelaskan melalui pendekatan sosial yakni, usia, pendidikan, pekerjaan dan status ekonomi serta agama. Faktor sosial ini merupakan faktor yang sangat kuat dari lainnya.

- a. Usia

Usia pemilih juga menentukan perilaku pemilih. Seperti pilihan pemilih yang lebih muda cenderung dipengaruhi oleh visi dan misi yang ditawarkan oleh calon. Mereka akan tertarik pada program kerja yang ditawarkan. Sedangkan pemilih dewasa cenderung memilih calon yang dekat dengan agama. Mereka tidak begitu peduli dengan program kerja yang dipromosikan oleh si calon. Menurut mereka, program kerja ditawarkan bisa saja tidak ada realisasinya.

b. Pendidikan

Pemilih yang memiliki latar pendidikan tinggi cenderung melihat caleg dari segi pendidikannya, sedangkan pemilih yang tidak dari latar belakang pendidikan tinggi tidak berfokus pada latar belakang pendidikan si calon. Mereka lebih memfokuskan pada pengalaman kerja maupun pengalaman organisasinya.

c. Pekerjaan dan status ekonomi

Pemilih yang memiliki status sosial menengah ke atas, lebih tertarik dengan program terkait kebijakan ekonomi. Misal terkait pajak usaha dan lain sebagainya. Sedangkan pemilih yang berasal dari kelas menengah ke atas akan berfokus pada kesejahteraan sosial dan bantuan sosial. Seperti terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat Gampong Tampang.

d. Agama

Faktor agama menjadi faktor kuat dalam menentukan pilihan bagi pemilih dewasa. Namun bagi pemilih yang berusia lebih muda, mereka berfokus pada visi dan misi si calon. Jika program yang ditawarkan rasional, maka pemilih muda akan mendukungnya, terlepas dari si calon kuat secara agama atau tidak.

2. Faktor Psikologis. Dalam penelitian ini terdapat 2 indikator yang dapat dijelaskan dalam pendekatan psikologis yakni sebagai berikut:

a. Identitas partai: masyarakat Gampong Tampang cenderung memilih partai atau caleg yang sesuai dengan identitas politik yang sudah terbentuk sejak lama. Seperti pada Pileg 2019 dimenangkan oleh PNA.

b. Emosional: emosi juga dapat mempengaruhi masyarakat dalam memilih. Misal, saat kampanye calon mapu meninggalkan kesan yang positif atau negatif. Jika positif, maka kecenderungan pemilih untuk memilih calon tersebut sangat besar. Begitu juga sebaliknya, jika kesan yang dibangun negatif, maka elektabilitas si calon pun juga akan menurun.

3. Faktor Ekonomi. Adapun indikator yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi adalah kesejahteraan. Pada masyarakat yang memiliki status ekonominya menengah ke bawah, maka cenderung untuk mendukung caleg yang menawarkan kebijakan terkait lapangan pekerjaan. Disisi lain, pada masyarakat yang memiliki status ekonomi menengah ke atas, akan memfokuskan pada kebijakan terkait keamanan maupun stabilitas politik. Hal ini dikarenakan masyarakat kelas menengah ke atas khawatir akan ketidakpastian kondisi politik yang berimbas pada kebijakan ekonomi negara yang akan berdampak pada *income* masyarakat tersebut, terlebih terkait resesi dan kenaikan pajak negara.

5. PENUTUP

Perilaku pemilih dalam menentukan pilihannya pada pemilihan umum legislatif 2019 di Gampong Tampang dipengaruhi oleh tiga faktor. Pertama, faktor sosial yang

terdiri dari indikator usia, pendidikan, pekerjaan dan status ekonomi serta agama. Faktor sosial ini merupakan faktor yang sangat kuat dari faktor lainnya. Kedua, faktor psikologis, yang terdiri dari 2 indikator, yakni identitas politik maupun emosional yang dibangun oleh caleg maupun timsesnya. Dalam hal ini, pemilih membuat keputusan yang tidak hanya didasarkan pada alasan rasional, tetapi juga emosi, identitas, dan pengalaman pribadi pemilih itu sendiri. Ketiga, faktor ekonomi. Adapun indikator yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi adalah terkait kesejahteraan. Jika pemilih dari kalangan menengah ke bawah akan memilih kandidat yang menawarkan program terkait terbukanya lapangan pekerjaan, namun pada pemilih yang berstatus ekonomi menengah ke atas lebih berfokus pada kandidat yang menjamin stabilitas politik. Hal ini dikarenakan stabilitas politik sangat erat kaitannya dengan pengambilan keputusan yang akan berdampak pada pendapatan pemilih itu sendiri.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, B. (2012). *Analisis Penelitian Kualitatif*. Raja Grafindo Persada.
- Gleko, P., Suprojo, A. & Lestari, A. W., 2017. Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*.
- Fahmi, R. & Jamaldi, 2015. *pengaruh pendidikan politik dan kinerja partai politik terhadap sikap apatis pemilih dalam pemilu 2014*. Al-Aqidah.
- Pahmi, et al., 2021. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 Di Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya*. Jawa Barat: Unigal.
- Wirawan, 2015. *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma*. Jakarta: Kencana.
- Sentosa, A. & Karya, B., 2022. *Perilaku Pemilih Pemula dalam Pilkada*. Jawa Tengah: Penerbitnem.
- Ali, M., 2020. *Perilaku Pemilih* [Interview] (19 Februari 2020).
- Sar, S., 2020. *Perilaku Pemilih pada Pemilihan Umum Legislatif 2019* [Interview] (19 Februari 2020).
- Anon., n.d. [Interview] n.d.
- Ami, 2020. *Perilaku Pemilih pada Pemilihan Umum Legislatif 2019* [Interview] (19 Februari 2020).
- Gustia, E., 2020. *Perilaku Pemilih pada Pemilihan Umum Legislatif 2019* [Interview] (25 Februari 2020).

- Wati, L., 2020. *Perilaku Pemilih pada Pemilihan Umum Legislatif 2019* [Interview] (26 Februari 2020).
- Miaz, Y. (2012). *Partisipasi Politik Pola Perilaku Pemilih Pemilu Masa Orde Baru dan Reformasi* (U. Press (ed.)). UNP Press Padang.
- Moleong, L. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Mopeng, E. D. (2016). *Perilaku Pemilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Minahasa Utara Periode 2016-2021*.
- Mustanir, A., & Jaya, I. (2016). Pengaruh Kepemimpinan dan Budaya Politik Terhadap Perilaku Pemilih Towani Tolotang Di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang. *Politik Profetik, 04 Nomor 1*.
- Pahmi, et al., 2021. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 di Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya*. Jawa Barat: Unigal.
- Prasetya, A., & Adi, S. (2014). Perilaku Politik Pemilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Kota Madiun. *Pamator, 7 Nmor 1*, 11–20.
- Rachmat, B., & Esther. (2016). Perilaku Pemilih Pemula Dalam Pilkada Serentak Di Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang Tahun 2015. *Ilmu Pemerintahan Widyapraja, XLII Nomor*, 25–35.
- Rahman, A. (2018). Konsep Dasar Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, 10 Nomor 1*, 44–51.
- Sitepu. (2012). *Teori-Teori Politik*. Graha Ilmu.
- Surbakti, R. (1999). *Memahami Ilmu Politik*. Grasindo